

**Daftar Informasi Publik (DIP)
PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
2	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa.
3	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat pribadi	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
4	Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat pribadi	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
5	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
6	Rahasia jabatan	UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
7	Belum dikuasai atau didokumentasi	UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
8	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi)	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
9	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi)	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
10	Bukti Pembayaran/Kwitansi Pembayaran dan Data Pendukung Lainnya	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
11	Dokumen Kontrak	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
12	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
13	Dokumen Penawaran Peserta	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
14	Detail Engineering Design / Rencana Teknik Akhir	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
15	Basic Design	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
16	Detail spesifikasi teknis	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
17	Dokumen proses dan penetapan pemenang atas lelang atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
18	Dokumen Sistem Manajemen Mutu	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
19	RKA dan DPA	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
20	SPJ	UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang